

**ANTARA ANARKI DAN DEMOKRASI:  
Masalah Kekerasan Politik di Indonesia\***

**Cornelis Lay\*\***

**Abstract**

*A critical analysis of how the New Order state has established its power basis and how the power has been utilised and abused leads us to conclude that anarchy is a rational response to the state's actions. Democracy, as a non-violent scheme of conflict management, is hampered by the formation of consolidated anarchy. Democratization leaves us with an agenda for mollifying violent.*

*Kata Kunci: kekerasan, anarki dan demokrasi.*

**Catatan Awal**

Meluasnya penggunaan kekerasan termasuk di dalamnya "penjarahan" dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan ekspresi dari meluasnya anarki secara kolektif dalam masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu gejala sosial, meluasnya anarki sosial bukan merupakan sesuatu yang sama sekali baru tanpa preseden dalam peradaban, terutama masyarakat pedesaan. Berbagai penelitian yang

\* Artikel ini pernah disampaikan sebagai makalah pengantar dalam Seminar Nasional satu Hari "Membangun Basis Ekonomi Mikro di Tengah Krisis Kenegaraan" yang diselenggarakan bersama Alocita Foundation dan Lembaga Penelitian R.P.C., Jakarta, 6 Oktober 1999.

\*\* Staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, Yogyakarta.

dilakukan para ahli,<sup>1</sup> telah sampai pada kesimpulan bahwa protes sosial bahkan dengan melibatkan "kerusuhan" dan "kekerasan" sebagai bahasa-bahasa sosial yang kongkrit telah menjadi bagian prinsip dari respons petani di banyak peradaban dalam melawan dominasi dan penindasan baik secara ekonomi, sosial, maupun kultural dan politik.

Di sejumlah kawasan perkebunan tebu, tembakau dan kopi di Jawa, misalnya, dikenal adanya "pembegalan", sebuah gejala yang dianggap sebagai "mengganggu" keamanan di pedesaan yang merupakan respons petani terhadap penindasan yang dilakukan oleh pihak perkebunan.

Dalam bentuknya yang lunak, perlawanan petani ini dirumuskan oleh Scott<sup>2</sup> sebagai "*everyday forms of resistance*" yang merupakan jawaban atas "*everyday forms of repression*" yang dihasilkan oleh proses transformasi pedesaan yang dimotori oleh negara lewat revolusi hijau yang telah mengubah secara drastis hubungan-hubungan produksi dalam masyarakat.

Jika berbagai bentuk anarki di kawasan pedesaan bisa dengan mudah dijelaskan menurut garis-garis argumen seperti telah disampaikan di atas, bagaimanakah kita memahami gejala yang hampir paralel yang juga bermunculan secara sangat luar biasa di kawasan perkotaan Indonesia, terutama dalam momentum-momentum politik kritis? Bagaimana kita memahami gejala anarki politik yang mendahului, menyertai dan sekaligus sebuah proses politik semisal pemilu?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas sangat sulit untuk dirumuskan secara sederhana. Akan tetapi, argumen bahwa

<sup>1</sup> Lichbach mengidentifikasi tiga bentuk pergolakan yang berbeda-beda di kalangan masyarakat pedesaan. Pertama dirumuskannya sebagai *every forms of peasants resistance*, *unorganized rural movements* dan *organized peasant rebellions*. Keterlibatan petani pada masing-masing bentuk di atas sangat tergantung pada kalkulasi mereka atas keuntungan masa depan yang ditawarkan yang oleh Lichbach dirumuskan sebagai "*selective incentives*". Dengannya petani pada dasarnya berteori secara rasional dalam melakukan pilihan-pilihan tindakan mereka. Lihat, Mark I. Lichbach (1994), "What Makes Rational Peasants Revolutionary? Dilemma, Paradox, and Irony in Peasant Collective Action," *World Politics*. Vol. 46, No.3.

<sup>2</sup> James Scott, *Weapons of the Everyday Forms of Peasant Resistance*, Yale University Press, New Haven, 1985.

setiap pelaku senantiasa berteori secara rasional sebelum memutuskan untuk terlibat dalam berbagai tindakan kolektif, termasuk dalam berbagai aksi "kerusuhan" seperti yang ditemukan dalam masyarakat pedesaan bisa juga dipakai untuk memahami gejala anarki politik di Indonesia.

### Anarki sebagai Jawaban Rasional

Penggunaan energi anarki secara kolektif termasuk yang hadir dalam rautnya sebagai "penjarahan" yang sangat meluas dalam masyarakat (perkotaan) Indonesia bukan semata-mata merupakan pengungkapan dari hasrat barbarian dan pelepasan energi anarki yang memang *inherent* dalam masyarakat. Akan tetapi sekaligus, bahkan terutama, merupakan pilihan-pilihan politik yang memiliki akar-akar penjelasan yang rasional.

*Pertama*, ia merupakan respons rasional terhadap perubahan karakter kekuasaan negara yang pada fase terakhir Orde Baru lebih menampakkan dirinya dalam raut sebagai kekuasaan "punitif" yang mengandalkan pada penyebaran ketakutan dan teror sebagai fondasi untuk mendapatkan kepatuhan masyarakat dan menegakkan tertib politik.

Evolusi karakter kekuasaan negara Orde Baru yang bertukar dari bentuk kekuasaan ideologis, ke bentuk kekuasaan remunerasif untuk kemudian berakhir dengan kekuasaan punitif, menurut hemat saya, merupakan penjelasan penting dalam memahami meningkatnya anarki politik dalam beberapa tahun terakhir ini.

Pada fase kekuasaan ideologis, kepatuhan masyarakat dan tertib politik dicapai pertama-tama dan terutama melalui persetujuan ideologis atas tujuan-tujuan bersama yang ingin dicapai Indonesia sebagai bangsa. Rumusan seperti "melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen", misalnya, memiliki daya reduksi ideologis yang sangat kuat di kalangan masyarakat yang membikin mereka patuh pada aneka pengaturan politik yang dilakukan oleh negara. Bahkan salah satu peristiwa pembantaian politik yang paling masif yang pernah ditemukan dalam sejarah peradaban modern, yakni selepas peristiwa G/30-S menemukan justifikasi ideologis yang

kuat yang membikin banyak kelompok masyarakat dengan "suka-rela" terlibat dalam proses tersebut.

Pada fase kekuasaan remuneratif, ketika "ketergantungan" masyarakat kepada negara dan regim menjadi kunci dalam menegakkan kepatuhan dan tertib politik, pemanfaatan secara maksimal dan kolektif bentuk-bentuk korupsi yang bersifat masif dijadikan sebagai metode oleh berbagai kelompok strategis guna memaksimalkan keuntungan dalam rangka pertukarannya dengan loyalitas dan tertib politik yang dituntut negara. KKN secara masif dalam sistem politik dan birokrasi negara, menemukan momentum pembenaran moralnya ketika corak kekuasaan remuneratif sedang berjaya dalam politik Indonesia. Semuanya menjalankan fungsi sebagai "penjarah" properti negara, termasuk kekuasaan. Hal ini bisa dibuktikan melalui banyak sekali kasus sederhana, termasuk, ekspektasi dan kemakluman masyarakat bahwa seorang "pimpro" misalnya, adalah layak dan bahkan wajib untuk kaya dan sangat tidak pantas untuk hidup melarat.

Ketika kekuasaan Orde Baru melakukan metamorfosa untuk mencapai bentuk barbariannya sebagai kekuasaan punitif dimana kekerasan dan teror yang dilakukan oleh negara menjadi fondasi untuk menegakkan kepatuhan dan tertib politik, pemanfaatan kekerasan kolektif oleh masyarakat menjadi pilihan logis yang diambil masyarakat.

Pada fase awalnya, kekerasan kolektif yang dimunculkan masyarakat lebih menampakkan diri sebagai kekerasan verbal secara kolektif yang merupakan respons atas kekerasan verbal yang secara sistematis diturunkan dari rahim kekuasaan negara. Meluasnya penggunaan istilah "gebug" yang dipelopori Soeharto, subversif, komunis, kiri, OTB, anti pembangunan, anti Soeharto, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kekerasan verbal yang dimunculkan negara, pada fase ini ternyata direspons secara kolektif melalui penciptaan rumor politik di tingkat massa. Kekerasan verbal yang bersifat timbal-balik ini kemudian melewati proses konsolidasi untuk hadir dalam bentuk anarki politik yang ditunjukkan dengan sangat jelas dari tindakan kongkrit masyarakat.

Jika diperhatikan siapa yang menjadi target dari semua bentuk kekerasan dan kerusuhan yang dimunculkan secara kolektif dalam

masyarakat, kita akan dengan mudah menemukan benang merah yang sama, yakni simbol-simbol negara yang terdekat dengan masyarakat. Kita menyaksikan dengan jelas, simbol-simbol penegakan tertib-hukum dan sosial-politik semisal polisi, tentara, kejaksaan berikut kantor-kantornya menjadi target-target tetap dari semua kerusuhan yang terjadi. Kita juga menyaksikan, simbol otoritas politik negara, semisal kantor-kantor pemerintah dan aparaturnya, mulai dari tingkat atas hingga ke desa dan kelurahan menjadi target-target lain yang sama diincar oleh semua gerakan kolektif masyarakat. Kita juga menyaksikan—terlepas dari secara aktual kelompok etnik-Cina yang menjadi korban langsung—simbol-simbol ekonomi yang merupakan sayap ekonomi negara Orde Baru, pengusaha misalnya, juga menjadi target permanen dari hampir semua gerakan anarki masyarakat.

Apa yang bisa dipelajari dari berbagai kasus kerusuhan sangat jelas: negara pada tingkat pengungkapannya yang kongkrit yang bisa dijangkau masyarakat menjadi target-target pokok dalam semua atau hampir semua gerakan kekerasan dan kerusuhan yang timbul dalam dua tahun terakhir ini. Anarki dengannya merupakan ungkapan pertengkaran antara negara dan masyarakatnya sendiri.

Pilihan untuk menggunakan kekerasan atau energi anarki secara kolektif menjadi lebih menarik lagi bagi kebanyakan masyarakat, justru karena secara empirik mereka menemukan bahwa eksploitasi dan pendayagunaan energi anarki memiliki akibat-akibat yang lebih kasat mata, cepat dan drastis ketimbang parlemen, kelompok penekan atau pun kelompok kepentingan, termasuk melalui jaringan dan jalur *lobby* untuk tujuan-tujuan yang sama. Dengan ini, masyarakat belajar dan berteori secara cepat dan rasional untuk sampai pada kesimpulan bahwa efektivitas penggunaan energi anarki secara kolektif lebih efektif dalam proses negosiasi dan tawar-menawar sosial, ekonomi, dan politik, ketimbang yang bisa ditawarkan oleh instrumen-instrumen politik lainnya, termasuk perjuangan hukum. Kenyataan empirik membuktikan, tuntutan-tuntutan masyarakat ternyata bisa dengan cepat mendapatkan respons positif dari regim penguasa justru ketika mereka mampu mengungkapkan energi anarki mereka secara publik dan kolektif, serta bersifat masif.

*Kedua*, anarki politik di tingkat masyarakat juga merupakan respons terhadap kekacauan atau anarki politik yang terjadi di tingkat negara. Dalam tahun-tahun terakhir Orde Baru kita menyaksikan kekacauan sistem secara total. Sistem politik formal, hanya menjadi kerangka kelembagaan pasif yang praktis kehilangan semua mekanismenya. Yang terjadi kemudian adalah proses personalisasi politik yang terus menerus, dan bangunan hubungan di dalam sistem sepenuhnya dipenuhi oleh hilir-mudiknya pertautan personal-subyektif. Konsekwensinya, ketidakpastian dan ketidakamanan menjadi fenomena yang mencolok dalam politik Indonesia.

Dalam kerangka untuk mendapatkan kepastian dan sekuritas politik yang sedemikian miskin bisa ditemui dalam "sistem politik tanpa sistem" atau "sistem pemerintahan tanpa pemerintahan" yang ada, hasrat-hasrat untuk mendemonstrasikan "kebesaran" dan signifikansi masing-masing kelompok mengedepan secara luar biasa. Dalam bentuknya yang ekstrim hasrat untuk membuktikan "kebesaran" diri dan kelompok di atas diterjemahkan melalui eksploitasi dan pengungkapan energi anarki secara kolektif dan masif. Dalam konteks seperti ini, kekerasan—baik yang bersifat verbal maupun fisik—menemukan momentumnya dalam masyarakat politik Indonesia. Kita menyaksikan, demonstrasi, bahkan kerusuhan dan berbagai bentuk kekerasan yang didemonstrasikan secara eksekusif oleh sejumlah kelompok sebagian besar sangat jelas diarahkan untuk mengekspresikan "otot" sebagai simbol dari kebesaran dan signifikansi yang bisa memaksa rimba-rama sistem mengakomodasinya.

*Ketiga*, anarki dalam masyarakat juga merupakan respons terhadap kesenjangan dan ketidakadilan, terutama yang diakibatkan oleh proses membangun yang dilakukan selama sekian lama. Konflik-konflik horisontal yang bersifat masif yang berlangsung di berbagai daerah, menurut saya sebagiannya terkait dengan persoalan kesenjangan sosial dan ketidakadilan ini. Di satu sisi kekerasan kolektif yang diarahkan pada satu kategori-kelompok tertentu dimaksudkan sebagai "balas dendam", pada saat yang bersamaan juga sebagai pesan tentang harapan bagi adanya keadilan dan kesamarataan. Keresahan-keresahan kolektif yang hadir dalam raut anarki di banyak daerah, bisa dijadikan sebagai contoh penting untuk menjelaskan hal ini.

Demikian pula anarki yang berakhir dengan kerugian total di pihak non-pri, adalah contoh lainnya. Sementara konflik lintas etnik di berbagai daerah juga menemukan alasan-alasan penting pada isu-isu kesenjangan dan ketidakadilan ini.

### Anarki dan Demokrasi

Jika pelebagaan mekanisme penyelesaian konflik secara damai dan beradab merupakan salah satu ukuran tertinggi dari sebuah peradaban politik demokratis, maka penggunaan kekerasan kolektif yang didemonstrasikan oleh sebagian masyarakat Indonesia di tahun-tahun terakhir ini, bukan merupakan kondisi yang kondusif untuk membangun peradaban demokratis dimaksud. Anarki bukan rute ke arah demokrasi, betapapun orang berkhayal soal ini.

Salah satu keunggulan demokrasi yang selalu diacungi jempol adalah terletak pada kemampuannya menyediakan mekanisme pengelolaan dan penyelesaian konflik tanpa melibatkan "darah" dan "nyawa" sebagai simbol-simbol kemanusiaan utama. Ketika demokrasi menawarkan "pemilu", maka di dalamnya terkandung makna sebagai penyediaan "arena perang" guna menentukan "pemenang". Pemilu adalah "perang". Akan tetapi sangat berbeda dengan perang yang dikenal, ia bisa memunculkan pemenang dan pecundang tanpa perlu melibatkan kekerasan, kematian, air mata, dan sebagainya.

Dalam konteks seperti di atas, merebaknya anarki bisa dipastikan bukan merupakan jalur yang kondusif bagi terciptanya demokrasi. Sebagai instrumen pemaksa dalam proses perjuangan kepentingan-kepentingan ekonomi, politik dan sosial di antara kelompok-kelompok, pemanfaatan energi anarki memang fungsional. Ia bisa dengan gampang menetapkan "pemenang" semata-mata karena kapasitasnya mengeksploitasi energi anarki secara lebih dasyat. Demikian pula, sebagai instrumen tawar-menawar ke hadapan negara, penggunaan energi anarki bisa jadi sangat fungsional untuk membawa perubahan-perubahan yang bersifat *instant*, cepat dan berskala luas. Soeharto, misalnya dipaksa turun dari singgasana kekuasaannya justru oleh kekuatan sejenis ini. Akan tetapi, keduanya, bukan merupakan kondisi yang ideal bagi penegakan demokrasi.

Demokrasi melibatkan penerimaan atau persetujuan yang bersifat suka-rela, ia bukan akibat dari sebuah proses "penaklukan" yang justru menjadi karakter dasar dari anarki.

### Masa depan Indonesia

Salah satu ancaman terbesar bagi masa depan bukan saja demokrasi tetapi semua bangunan peradaban bangsa Indonesia adalah pelembagaan anarki baik yang bersifat kasat maupun yang bercorak simbolik sebagai mekanisme dan instrumen pengaturan hubungan-hubungan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Proses ini sedang berlangsung. Dan bisa diduga, jika ia terus berjalan akan mencapai fase sebagai "*consolidated anarchy*"-istilah yang diinspirasi oleh penggunaan istilah *consolidated democracy* oleh Linz dan Stepan yang akan lebih banyak menghasilkan "korban-korban kemanusiaan" ketimbang "buah-buah kebajikan" yang akan memperkaya peradaban kita.

Di antara "kerugian-kerugian" jangka panjang, misalnya musnahnya peradaban seperti disebutkan di atas, terdapat sederetan panjang resiko-resiko jangka pendek dan menengah yang harus ditanggung kita sebagai bangsa. *Pertama*, fragmentasi dan keterpecahan masyarakat akan terus berlanjut dan mencapai sebuah fase yang sangat sulit untuk dirajut kembali jika eksploitasi dan penggunaan energi anarki tak juga mencapai terminal pemberhentiannya. Ini akan berakibat negatif pada kehancuran basis-basis dan potensi-potensi *civil society* yang tidak mungkin bisa tumbuh tanpa adanya "*trust*" secara timbal-balik di antara berbagai kelompok.

*Kedua*, sumber-sumber energi anarki akan terus dieksplorasi untuk mendapatkan daya "penghancuran" yang lebih besar. Demikian pula, pemanfaatan energi anarki mewajibkan kemampuan untuk melakukan radikalisasi secara konstan. Keduanya bisa dengan mudah membawa setiap pengelompokan dan individu untuk menemukan sumber yang menyimpan energi tidak terhingga dan sekaligus terbuka bagi proses radikalisasi, yakni kategori-kategori atau sentimen-sentimen komunal atau primordial. Apa yang terjadi di Maluku, saya kira sudah lebih dari cukup untuk berceritera tentang ini.

*Ketiga*, perluasan anarki kolektif akan dengan sendirinya memperluas wilayah "ketidakpastian" dan "ketidakamanan" untuk menjangkau pula wilayah-wilayah di luar sistem politik dan pemerintahan formal. Pada tingkat paling minim, ini akan semakin memperbesar arena penyebaran rumor. Akan tetapi pada tingkat yang ekstrim akan mendorong terjadi gerakan perpindahan secara spasial. Dalam kondisi yang kongkrit di Indonesia, ini sekaligus punya implikasi terhadap perpindahan secara spasial "modal" sebagai fondasi untuk membangun sistem kesejahteraan bersama. Modal, kongkritnya, bukan saja enggan untuk masuk, tapi sebaliknya akan bergerak ke luar mengikuti psikologi ketidakpastian dan ketidakamanan yang melanda para pemiliknya.

Dalam konteks ini, diskusi-diskusi tentang deregulasi ekonomi di tengah krisis kenegaraan yang semakin ramai dilakukan belakangan ini menjadi penting untuk mampu menemukan jawaban-jawaban politik atas kesulitan-kesulitan ekonomi yang kini dihadapi Indonesia.

*Keempat*, secara lebih umum meluasnya penggunaan energi anarki bukan saja akan menjadi reklame buruk bagi Indonesia di fora internasional, tetapi di atas segalanya, akan secara sungguh-sungguh berakibat pada bukan saja pelanggaran yang semakin serius terhadap HAM, dan terlebih lagi terhadap penyangkalan atas kemanusiaan itu sendiri. Kita akan dengan mudah menemukan terbentuknya kelompok-kelompok yang berstatus sebagai "*sub-human being*" yang secara moral bisa dibenarkan untuk diperlakukan seperti apapun. Gejala ini sempat menguat di Indonesia, terutama ketika tragedi kemanusiaan medio Mei 1998 sedang berlangsung.

### Catatan Penutup: Solusi?

Sederetan akibat dari perluasan penggunaan energi anarki sudah dirumuskan secara tepat. Persoalannya adalah bagaimana menjawab persoalan ini? Terdapat banyak kemungkinan yang bisa ditawarkan. Akan tetapi sejumlah hal berikut ini menurut saya merupakan kunci utamanya.

*Pertama*, jika perluasan penggunaan energi anarki kita sepakati merupakan respons terhadap penggunaan kekerasan secara

struktural oleh negara, maka "pelunakan" raut kekerasan negara menjadi kunci utamanya. Negara yang sifatnya menindas dan menghukum harus ditransformasi untuk menjadi negara yang "melindungi" dan memfasilitasi. Ini berarti, mengeliminasi sampai titik minim semua potensi kekerasan negara menjadi pekerjaan utama. Tentara, menurut saya bisa memberikan sumbangan yang besar dalam hal ini. Akan tetapi sudah tentu, pengembangan sistem yang demokratis merupakan solusi terbaik.

*Kedua*, jika disepakati bahwa sebagian dari alasan perluasan penggunaan energi terletak pada kekacauan sistem politik secara keseluruhan dimana ketidakpastian dan ketidakamanan serta dominannya mekanisme individual menjadi ciri-ciri pokoknya, maka kita akan sepakat bahwa pelembagaan sistem merupakan jawaban yang tak terelakkan guna meminimalisasi kecenderungan di atas. Sudah saatnya kita membangun kembali mekanisme kelembagaan dan mengabaikan mekanisme oligarkhis yang senantiasa bergerak pada level personal. Harapan mestinya bisa diletakkan di tangan lembaga MPR dan DPR sekarang ini. Akan tetapi terdapat juga indikasi yang kuat yang memperlihatkan "intervensi" individual mampu mengacaukan secara prinsipil mekanisme kelembagaan yang mulai dibangun.

*Ketiga*, jika kita sepakat bahwa salah satu alasan melebarnya penggunaan energi anarkhi secara kolektif melekat di dalam struktur masyarakat terutama sebagai akibat dari politik pembangunan yang diskriminatif dan keliru yang jauh dari adil, maka penyelesaian persoalan kesenjangan dan ketidakadilan harus menjadi skala prioritas kebijaksanaan politik bangsa yang harus dilakukan segera.

Saya percaya, dengan menyentuh tiga arena sensitif di atas, sebagian besar dari persoalan perluasan penggunaan energi anarkhi secara kolektif bisa direduksi sampai pada tingkat yang *manageable*. Semoga!!\*\*\*

### Daftar Pustaka

- Lichbach, Mark I, (1994) "What Makes Rational Peasants Revolutionary? Dilemma, Paradox, and Irony in Peasant Collective Action," *World Politics*, Vol. 46, No.3.
- Scott, James, (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, New Heaven: Yale University Press.